

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

- Arif, B. N. (2011). *Reformasi Sistem Peradilan Pidana(Sistem Penegakan Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aziz, S. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamza, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono. (2012). *Penyidik & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi* . Bandung: Graha Ilmu.
- Irianto, S. (2015). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*. CV Social Policit Genius.
- Lamintang, P. (1984). *Hukum Panistesier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Moeljatno. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Peradilan* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramano, M. A. (2010). *Perdagangan Orang Dimensi Instrumen Internasional penganturanya di Indonesia*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI .
- S, L. A. (Desember 2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublist.

- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Setiabudi, T. (2013). *Kejahatan Dalam Masyarakat* . Bandung: Citra Aditya.
- Soerjono, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Undip Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum.
- Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Waluyo, B. (2004). *Pidana dan Pemindaan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkanaen, I. (2015). *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologi*. Yogyakarta: Deepublist.

B. Peraturan per-Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981TentangHukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberatasan Tindak pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

C. Jurnal/Artikel Ilmia

- Siswanto, H. (2013). Kegagalan Penegakan Hukum Pidana kejahatan Perdagangan Orang. *Jurnal Masalah-Masalah* .

Kamea, H. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *jurnal lex crimen Vol v* .

D. Internet

<http://digilib.unila.ac.id/9385/6/Bab%20V.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id>

[https://pih.kemlu.go.id/files/UU no 21 th 2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf)

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/881/760>

<https://core.ac.uk/download/pdf/77623262.pdf>